KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RI ajak IPU tolak status Ibukota Yerusalem
Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

RI Ajak IPU Tolak Status Ibu Kota Yerusalem

JENEWA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan dukungan untuk Palestina dalam Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-138 di Gedung CICG, Jenewa, Swiss, kemarin.

Dalam pernyataannya, Fadli Zon yang memimpin delegasi Indonesia sangat menyesalkan keputusan yang dibuat Amerika Serikat (AS) mengenai status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Kami juga mengutuk rencana relokasi Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tindakan-tindakan ini mengancam proses perdamaian Israel-Palestina dan mengancam perdamaian dan stabilitas global. Keputusan Trump tidak bertanggung jawab, tidak manusiawi, dan sangat tidak dapat diterima," kata Fadli dalam rilis yang diterima *KORAN SINDO*, kemarin.

Sebelumnya *point emergency item* yang diusulkan terbagi menjadi tiga isu, yakni usulan yang diajukan Israel terkait aktivitas kelompok muslim Iran di kawasan Timur Tengah, proposal dari Swedia terkait penolakan kekerasan perempuan di lingkungan kerja, dan proposal gabungan (Palestina, Kuwait, Bahrain, Turki) terkait dukungan untuk Palestina.

Delegasi Indonesia menyatakan dukungan pada usulan poin ketiga, yaitu dukungan untuk Palestina dan mengecam tindakan AS mengenai status Kota Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. *Point emergency item* terkait Palestina mendapat dukungan 843 suara parlemen dunia. Sebaliknya Indonesia menolak proposal usulan Israel sepenuhnya.

IST

FADLI ZON
Wakil Ketua DPR

Indonesia menilai banyaknya pelanggaran yang dilakukan AS dan Israel terkait instrumen internasional, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 (1967), 252 (1968), 476 (1980), 478 (1980), dan Resolusi Majelis Umum PBB 181 (II). Sejalan dengan resolusi ini, keputusan AS dan tindakan legislatif serta administratif berikut untuk mengubah karakter dan status Yerusalem harus dianggap ilegal.

Sidang IPU yang dihadiri 146 negara di antaranya turut serta 69 ketua parlemen dari masing-masing negara digelar di Gedung CICG, Jenewa, Swiss. Sidang IPU dihadiri total 1.539 anggota parlemen dunia membahas perlindungan untuk pengungsi dan migrasi internasional.

Pada Sidang IPU ke-138, Fadli Zon juga menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya PBB, agar segera memikul tanggung jawab menghalangi pernyataan sepihak AS dan menghentikan pemukiman ilegal di tanah Palestina. "Kami mendesak PBB memaksa Israel dan AS untuk mematuhi semua instrumen hukum internasional," katanya.

Kebijakan memotong USD125 juta dalam pendanaan untuk Badan PBB untuk bantuan pengungsi Palestina (UNRWA) menunjukkan bahwa AS tidak memiliki kemauan politik mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Karena itu, AS telah kehilangan kapasitas menegakkan negosiasi damai. "Ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan global AS," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini.

Keputusan yang dibuat para pejabat Israel pada pembangunan lebih dari 2.200 unit pemukiman baru di Tepi Barat yang diduduki adalah pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 menyerukan Israel untuk segera dan sepenuhnya menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. "Kami menyatakan bahwa setiap penodaan tempat-tempat suci agama di Yerusalem dapat memperburuk situasi global, memicu perselisihan, konflik, dan ekstremisme," ujar Fadli Zon.

Upaya ilegal Israel mengubah penampilan demografi Yerusalem selama dekade terakhir melalui pembangunan pemukiman ilegal, penghancuran situs sejarah, dan dengan mengusir penduduk lokal Palestina adalah pelanggaran hak-hak fundamental rakyat Palestina. "Terkait situasi di Palestina, tentu saja kami delegasi Indonesia yang menganut prinsip konstitusi kemerdekaan adalah hak mutlak semua bangsa. Kami dengan tegas menolak semua bentuk kolonialisme dan pendudukan ilegal. Kami mendesak parlemen anggota IPU untuk mengakui hak-hak warga Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka," ujarnya.

Fadli Zon menegaskan, IPU harus mengirimkan pesan kuat melalui sebuah resolusi bahwa parlemen dan anggota parlemen di dunia harus tegas membela keamanan, demokrasi, dan keadilan. Resolusi yang diadopsi pada *item emergency* harus efektif dan berlaku. "Sebagai bagian dari komitmen dan dukungan terhadap Palestina, Indonesia mengusulkan rancangan resolusi menyerukan kepada PBB agar AS menarik pengakuan kontroversial Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan mendesak pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat menurut perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BSKAP) DPR Rofi' Munawar mengatakan, ada dampak signifikan dari kebijakan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Kebijakan itu jelas melanggar sejumlah resolusi PBB, terutama berkaitan dengan status legal Yerusalem.

● **nugroho**